

## Analisis Implementasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (*E – Government*) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros

Uswatun Hasanah<sup>1</sup>, Muh Fadli Fauzi Sahlan<sup>2</sup>, Abdillah SAS<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Teknik, Universitas Bosowa

<sup>1,2,3</sup>Jl. Urip Sumoharjo No.Km.4, Sinrijala, Makassar, Indonesia, 90232

Email: <sup>1</sup>uthasanah24@gmail.com, <sup>2</sup>fadli.fauzi@universitasbosowa.ac.id, <sup>3</sup>abdillah.sas@universitasbosowa.ac.id

\*Korespondensi Penulis

Submitted: 16/12/2023; Revised: 18/07/2024; Accepted: 31/07/2024

**Abstrak**– *E-Government* merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah untuk menyediakan informasi dan layanan kepada warga negara, bisnis, dan entitas pemerintah lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap implementasi *e-government* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam kaitannya peningkatan kinerja pelayanan publik dan juga memberikan informasi tentang kondisi faktual berupa keunggulan dan kelemahan dalam implementasi *e-government* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, sehingga dapat memberikan langkah-langkah dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik. *E-Government* memainkan peran yang sangat penting dalam transformasi pemerintahan menuju era digital. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, *e-government* dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan public. *E-Government* ini membuat masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan layanan prosesnya lebih transparan dan terstandarisasi. Meskipun tatap muka berkurang, tetapi perilaku petugas tetap penting karena pelatihan dan peningkatan keterampilan petugas menjadi kunci penting dalam kepuasan Masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh dari *e-government* pada pemerintah kabupaten maros yaitu literasi digital di Indonesia pada umumnya, termasuk di Maros, masih berada pada level "sedang". Indeks literasi digital nasional, yang meliputi aspek informasi dan literasi data, komunikasi dan kolaborasi, keamanan, serta kemampuan teknologi, menunjukkan bahwa masih ada banyak ruang untuk perbaikan, khususnya dalam hal informasi dan literasi data.

**Kata Kunci:** *E-government*, Website, Media Komunikasi

*Abstract*–*E-Government* is the use of information and communication technology (ICT) by the government to provide information and services to citizens, business, and other government entities. This study aims to conduct an analysis of the implementation of *e-government* in the Regional Government of Maros Regency in relation to improving the performance of public services and also providing information about factual conditions in the form of excellence and weaknesses in the implementation of *e-government* to the Maros Regency Government, so as to provide steps In an effort to improve the performance of public services. *E-Government* plays a very important role in the transformation of government towards the digital era. By utilizing information and communication technology, *e-government* can improve efficiency, transparency, and quality of public services. . This *e-government* makes it easier for people to get more transparent and standardized process services. Although face to face is reduced, but the behavior of officers remains important because training and improvement of officers' skills is an important key in community satisfaction. The results of research obtained from *e-government* in the Maros Regency Government are digital literacy in Indonesia in general, including in Maros, still on "Medium" level. The national digital literacy index, which includes aspects of information and data literacy, communication and collaboration, security, and technological capabilities, shows that there are still many space for improvement, especially in terms of information and data literacy.

**Keywords:** *E-government*, Website, Communication Medias

### 1. PENDAHULUAN

Sistem *Electronic Government (e-government)* mampu memberikan banyak manfaat bagi institusi pemerintahan. Evolusi penggunaan TIK dalam operasi pemerintah bermaksud untuk mengatasi transparansi, akuntabilitas dan efektivitas dalam pelayanan sektor publik. *E-government* sangat penting karena meningkatkan aktivitas organisasi sektor publik dan agennya [5]. Inisiatif *e-government* dapat berbagai bentuk, termasuk portal *online*, aplikasi seluler, dan *platform* digital lainnya yang memungkinkan warga negara untuk mengakses informasi pemerintah, mengirimkan aplikasi dan formulir, membayar tagihan dan pajak, serta berinteraksi dengan layanan pemerintah secara *online*. Tujuannya adalah memberikan kanal digital yang nyaman, mudah diakses, dan ramah pengguna agar warga negara dapat berinteraksi dengan pemerintah dan memanfaatkan layanan publik [2].

Manfaat *e-government* meliputi peningkatan efisiensi, pengurangan penggunaan kertas, penghematan biaya, peningkatan penyampaian layanan, peningkatan transparansi, dan partisipasi warga negara dalam tata kelola. Ini juga memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan lebih efektif, sehingga mendorong pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berdasarkan bukti. Secara

keseluruhan, *e-government* memainkan peran penting dalam memodernisasi administrasi publik dan meningkatkan hubungan antara pemerintah dan warga negara dengan memanfaatkan kekuatan [3]. *E-government* adalah penggunaan TIK untuk meningkatkan proses layanan dan informasi oleh pemerintah kepada warga [6]. Teknologi tersebut dapat meningkatkan penyampaian layanan pemerintah yang lebih baik kepada masyarakatnya, memungkinkan interaksi yang lebih mudah antara pemerintah dan bisnis, membantu interaksi dengan mitra, serta memberdayakan warga melalui peningkatan akses informasi dan efisiensi dalam manajemen pemerintah [5] serta mentransformasikan ke arah era digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan [7].

*E-government* telah mapan diimplementasikan di negara-negara maju. Namun, implementasi di negara-negara berkembang dengan infrastruktur yang masih rendah mengalami hambatan [8]. Sehingga untuk memanfaatkan sepenuhnya perlu mengatasi berbagai hambatan dan tantangan di mana tantangan *e-government* bukan hanya pada teknologi, namun melibatkan struktur organisasi dan keterampilan, gaya kepemimpinan, serta mengubah kemitraan publik-swasta [9].

Dalam kedudukannya, Kabupaten Maros memegang peranan penting terhadap pembangunan Kota Makassar karena sebagai daerah perlintasan yang sekaligus sebagai pintu gerbang Kawasan Mamminasata bagian utara yang dengan sendirinya memberikan peluang yang sangat besar terhadap pembangunan di Kabupaten Maros. Di daerah ini juga terdapat banyak tempat wisata andalan bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Makassar dan Sulawesi Selatan, yaitu Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung dan objek wisata batu karst terbesar kedua di dunia Rammang-Rammang, selain itu Kabupaten Maros juga memiliki potensi ekonomi karena Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin berada di Kabupaten Maros [14].

Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi di daerah pedesaan juga menjadi tantangan signifikan. Upaya untuk meningkatkan literasi digital di Maros melibatkan penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai serta peningkatan kualitas dan aksesibilitas perpustakaan desa, yang diharapkan dapat mendorong budaya literasi lebih jauh [4].

Dengan demikian, strategi pengembangan e-government harus berbasis nilai, bukan berbasis teknologi, karena manfaat dari *e-government* tidak dilakukan dengan digitalisasi dan penempatan secara *online* mengingat tujuan *e-government* dalam pembangunan berkelanjutan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada warga dengan cara yang efisien dan dengan demikian memfasilitasi pencapaian keberlanjutan di berbagai tingkatan [10], [11].

## 1. Topografi Kabupaten Maros

Kondisi topografi Kabupaten Maros sangat bervariasi mulai dari datar, berbukit sampai bergunung. Hampir semua wilayah Kabupaten Maros merupakan daerah dataran dengan luas keseluruhan sekitar sebesar 43,8 persen dari total wilayah Kabupaten Maros. Sedangkan daerah yang mempunyai kemiringan lereng di atas 40 persen atau wilayah bergunung-gunung mempunyai luas sebesar 30,8 persen dari luas wilayah Kabupaten Maros.

## 2. Letak Geografis Kabupaten Maros

Kabupaten Maros terletak di bagian barat Sulawesi Selatan antara 40°45'-50°07' lintang selatan dan 109°205'-129°12' bujur timur yang berbatasan dengan Kabupaten Pangkep sebelah utara, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa sebelah selatan, Kabupaten Bone di sebelah timur dan Selat Makassar di sebelah barat. Kabupaten Maros berada pada rentang ketinggian antara 0 m sampai dengan lebih dari 1.000 m dari permukaan laut. Di wilayah Kabupaten Maros terdapat beberapa gunung dengan jenis gunung yang tidak aktif dan tidak begitu tinggi, seperti Gunung Barro-Barro, Rammang-Rammang, Samaenre, Bulu Saraung, dan Bulu Saukang. Bulu Saukang adalah gunung yang tertinggi di wilayah Kabupaten Maros dengan ketinggian mencapai 260 m di atas permukaan laut.

Dilihat dari lokasi geografi dan topografinya, dari 103 desa/kelurahan yang ada di kabupaten Maros, 10 desa berada pada wilayah pantai, 5 desa berada pada wilayah lembah, 28 desa berada pada wilayah perbukitan, dan sisanya 60 desa/kelurahan berada pada wilayah dataran/landai. Kecamatan Tompobulu merupakan kecamatan yang memiliki wilayah paling luas, sedangkan kecamatan yang wilayahnya paling kecil adalah kecamatan Turikale. Kondisi Topografi Kabupaten Maros sangat bervariasi mulai dari wilayah datar sampai bergunung-gunung. Hampir semua di kecamatan terdapat daerah pedataran yang luas keseluruhan sekitar 70.882 ha atau 43,8% dari luas wilayah Kabupaten Maros. Sedangkan daerah yang mempunyai kemiringan lereng di atas dari 40% atau wilayah yang bergunung-gunung mempunyai luas 49.869 ha atau 30,8 dari luas wilayah Kabupaten Maros.



**Gambar 1.** Gambar Latak Topografi Kabupaten Maros

Terbitnya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 menjadi titik awal penerapan *e-government* di Indonesia. Inpres tersebut menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam organisasi pemerintah guna penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. *E-government* diharapkan dapat mengeliminasi sekat-sekat birokrasi, serta terbentuknya jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan berbagai instansi pemerintah dapat bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses informasi dan proses layanan. Sejak saat itu berbagai organisasi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah mulai bergerak dalam memanfaatkan TIK untuk mengimplementasikan *e-government* di daerahnya [1].

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap implementasi *e-government* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam kaitannya peningkatan kinerja pelayanan publik dan juga memberikan informasi tentang kondisi faktual berupa keunggulan dan kelemahan dalam implementasi *e-government* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, sehingga dapat memberikan langkah-langkah dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik [17].

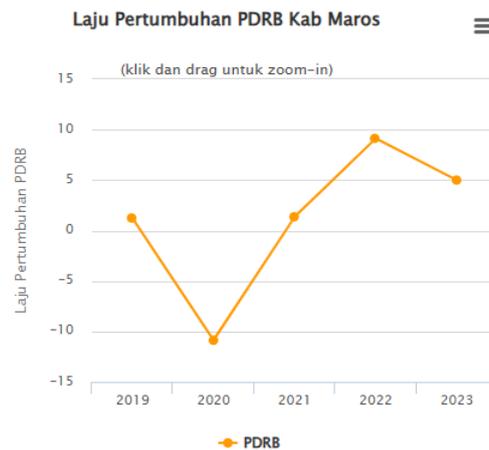
## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literatur. Metode literatur, juga dikenal sebagai tinjauan literatur atau kajian pustaka, adalah pendekatan penelitian yang melibatkan analisis dan sintesis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian tertentu. Metode ini digunakan untuk memahami penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, menganalisis temuan-temuan yang ada, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, dan menyusun dasar teoretis untuk penelitian yang sedang dilakukan.

### 1. Presentase BPS Pada Kabupaten Maros

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Maros, berikut merupakan data Badan Pusat Statistik (BPS), Pertumbuhan PDRB kabupaten maros dari tahun 2019 – 2023:

- a. 2019 PDRB : 1.24%
- b. 2020 PDRB : -10.87%
- c. 2021 PDRB : 1.36%
- d. 2022 PDRB : 9.13%
- e. 2023 PDRB : 5.00%



Gambar 2. Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Maros

## 2. Perkembangan Jumlah Wisata Kabupaten Maros

Definisi wisatawan mancanegara sesuai dengan rekomendasi *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) adalah setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Definisi ini mencakup dua kategori tamu mancanegara, yaitu:

### 2.1 Wisatawan (*tourist*)

Adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal paling sedikit dua puluh empat jam, akan tetapi tidak lebih dari dua belas (12) bulan di tempat yang dikunjungi dengan maksud kunjungan antara lain:

- berlibur, rekreasi dan olahraga
- bisnis, mengunjungi teman dan keluarga, misi, menghadiri pertemuan, konferensi, kunjungan dengan alasan kesehatan, belajar, dan keagamaan

### 2.2 Pelancong (*Traveler*)

Adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal kurang dari dua puluh empat jam di tempat yang dikunjungi (termasuk cruise passenger yaitu setiap pengunjung yang tiba di suatu negara dengan kapal atau kereta api, dimana mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut). Secara keseluruhan, jumlah pengunjung ke objek wisata utama di Kabupaten Maros menunjukkan pola yang beragam, dengan beberapa lokasi mengalami peningkatan jumlah wisatawan yang signifikan, sementara yang lain mengalami penurunan atau fluktuasi.

## 3. Pelayanan Publik Berbasis *E-Government*

Pelayanan publik berbasis *e-government* adalah pendekatan di mana pemerintah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses kepada masyarakat. Ini melibatkan penggunaan internet, aplikasi seluler, dan teknologi lainnya untuk menyediakan layanan publik seperti pengajuan dokumen, pembayaran pajak, reservasi layanan publik, dan berbagai informasi pemerintah lainnya secara *online*. Ada beberapa tantangan yang harus diatasi dalam implementasi *e-government*, seperti kesenjangan digital, masalah keamanan data, dan resistensi terhadap perubahan dari pihak internal pemerintah. Dengan strategi yang tepat dan investasi yang memadai dalam infrastruktur TIK dan literasi digital, pelayanan publik berbasis *e-government* dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan efisiensi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan [15].

Pelayanan publik dari penyelenggara pemerintah menggunakan standar pelayanan yang merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan, serta acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji pemerintah kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur [12].

#### 4. Tabel Analisis

Tabel 1 berikut merupakan beberapa menu pelayanan yang terdapat pada *Website Resmi* dari Kabupaten Maros:

**Tabel1.** Menu pelayanan pada *Website*

Menu Pelayanan	Tertampilkan/tidak ditampilkan	Keterangan
Sambutan	Ada	Pada menu sambutan berisi sambutan dari Bupati Maros
Profil	Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visi dan Misi 2021 – 2024</li> <li>• Struktur Organisasi</li> </ul>
Potensi Dan Investasi	Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi Bentang alam dan peninggalan budaya</li> <li>• Potensi flora dan fauna</li> <li>• Potensi kehutanan</li> <li>• Potensi pariwisata</li> <li>• Potensi pertanian</li> <li>• Potensi perdagangan</li> <li>• Potensi perkebunan</li> <li>• Potensi perikanan</li> <li>• Potensi perkembangan dari bahan galian</li> <li>• Kawasan KARTS kabupaten maros</li> </ul>
Selayang Pandang	Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sejarah maros</li> <li>• Geografi</li> <li>• Geologi</li> <li>• Demografi</li> <li>• Hidrologi</li> <li>• Kimatologi</li> <li>• Topografi</li> <li>• Lambang daerah</li> </ul>
Informasi	Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleksi terbuka pemerintahan kabupaten maros</li> <li>• RLPPD 2022 T.A 2023</li> <li>• Daftar informasi public</li> <li>• Gratifikasi, suap dan pungli</li> <li>• RLPPD MAROS 2021 ta 2022</li> <li>• LHKPN BUPATI</li> </ul>
Pengumuman	Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumuman calon seleksi perseroda 2023</li> <li>• Surat edaran tentang penguatan transisi pendidikan anak usia dini</li> <li>• Surat edaran pelaksanaan SPI</li> <li>• Perubahan jadwal pengumuman calon pejabat tinggi</li> <li>• Pengumuman selter JPTP</li> <li>• dll.</li> </ul>
Ringkasan APBD	Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ringkasan APBD 2023</li> <li>• ringkasan APBD 2022</li> <li>• ringkasan APBD pad 2021</li> <li>• ringkasan APBD 2019</li> <li>• perda APBD ta. 2020</li> </ul>
Info CASN	Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengumuman akhir PPPK tenaga teknis maros 2022</li> <li>• pengumuman kelambatan kelulusan PPPK guru</li> <li>• rekapitulasi hasil seleksi kompetensi PPPK tenaga teknis</li> <li>• pengumuman pra sanggah hasil seleksi PPPK tenaga teknis kab. Maros formasi 2022</li> <li>• pengumuman dan lampiran PPPK guru maros 2022</li> <li>• pengumuman pengunduran diri PPPK guru</li> <li>• dll.</li> </ul>

#### 5. Analisis IKM Terhadap Pelayanan Publik Berbasis E-Government

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Dalam konteks *e-government*, IKM menjadi penting untuk menilai sejauh mana penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik memenuhi harapan dan kebutuhan Masyarakat [13]. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan suatu ukuran untuk mengukur sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan

sejauhmana pemerintahan telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Analisis IKM terhadap pelayanan *e-government* di Kabupaten Maros memiliki Prosedur Layanan yang Dimana Pelayanan berbasis *e-government* di Kabupaten Maros memungkinkan prosedur yang lebih sederhana dan jelas [17]. Penggunaan aplikasi dan portal *online* mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan mengurus berbagai layanan administrasi tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. Dengan adanya layanan *online*, persyaratan pelayanan dapat diakses dengan mudah dan jelas melalui situs resmi. Ini mengurangi kebingungan masyarakat mengenai dokumen apa saja yang diperlukan untuk berbagai jenis layanan.

Layanan *e-government* umumnya mempercepat waktu pelayanan karena proses dapat dilakukan secara elektronik dan otomatis. Namun, waktu respons yang cepat juga tergantung pada infrastruktur teknologi dan manajemen sistem yang efisien. Penggunaan *e-government* dapat mengurangi biaya administrasi baik bagi pemerintah maupun masyarakat, seperti biaya transportasi untuk datang ke kantor dan biaya cetak dokumen fisik. Dengan sistem *e-government*, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan layanan yang sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan karena prosesnya lebih transparan dan terstandarisasi.

Keberhasilan *e-government* sangat tergantung pada kompetensi petugas dalam mengoperasikan sistem digital [18]. Pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi petugas menjadi kunci penting dalam meningkatkan kepuasan Masyarakat. Meskipun interaksi tatap muka berkurang, perilaku petugas tetap penting terutama dalam merespon pengaduan atau permintaan bantuan melalui platform digital. Respons yang cepat dan sopan tetap menjadi indikator penting. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur TIK, seperti jaringan internet yang stabil dan perangkat keras yang memadai, sangat mempengaruhi efektivitas layanan *e-government*. Mekanisme pengaduan yang efektif dan transparan melalui *platform e-government* membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Layanan pengaduan *online* memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan yang dapat langsung ditindaklanjuti.

## 6. Evaluasi Implementasi E-Government Kabupaten Maros

*E-Government* di Kabupaten Maros telah dioperasionalkan dengan situs web [ppid.maroskab.go.id](http://ppid.maroskab.go.id) untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik. Evaluasi implementasi *e-government* di Kabupaten Maros akan melibatkan penilaian atas seberapa efektif dan efisien sistem *e-government* tersebut dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Ketersediaan Layanan pada evaluasi ini akan memeriksa sejauh mana berbagai layanan publik telah diintegrasikan ke dalam sistem *e-government*, termasuk pengajuan dokumen, pembayaran pajak, reservasi layanan, dan lainnya. Penilaian akan dilakukan terhadap seberapa mudah akses masyarakat terhadap layanan-layanan *e-government* ini [16]. Ini termasuk pertimbangan tentang apakah infrastruktur TIK sudah cukup baik dan apakah ada program-program untuk meningkatkan literasi digital di masyarakat. Menilai sejauh mana implementasi *e-government* telah meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah, termasuk pengurangan birokrasi dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses-proses administratif.

*E-government* telah meningkatkan transparansi pemerintah dengan memberikan akses yang lebih luas kepada informasi-informasi publik dan keputusan-keputusan administratif. Penilaian akan dilakukan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan-layanan *e-government* ini [13]. Hal ini dapat mencakup jumlah pengguna aktif, tingkat kepuasan pengguna, dan tingkat umpan balik yang diberikan oleh masyarakat. Memeriksa keamanan sistem *e-government* dan proteksi data pribadi masyarakat, serta langkah-langkah yang diambil untuk mencegah penyalahgunaan atau pelanggaran privasi. Dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek-aspek ini, pemerintah Kabupaten Maros dapat memahami kekuatan dan kelemahan dari sistem *e-government* yang telah mereka implementasikan, serta mengidentifikasi area-area di mana perbaikan lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Maros adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Jauh dari sebelumnya Kabupaten Maros merupakan salah satu wilayah kerajaan di Sulawesi Selatan. Di daerah ini pernah berdiri Kerajaan Marusu' dengan raja pertama bergelar Karaeng Loe Ri Pakere. Maros memperoleh status sebagai kabupaten pada tanggal 4 Juli 1959 berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959. Pada tanggal tersebut juga ditetapkan

sebagai hari jadi Kabupaten Maros berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2012. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Turikale. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.619,12 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 353.121 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 218,09 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2019.

Kondisi literasi digital di Kabupaten Maros mengalami beberapa tantangan dan perkembangan. Pemerintah Kabupaten Maros mulai menunjukkan komitmen dalam meningkatkan literasi digital dengan berbagai inisiatif dan program. Salah satu langkah signifikan adalah penerapan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang tidak hanya berfokus pada peningkatan budaya baca tetapi juga berfungsi sebagai tempat berkegiatan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan. Meskipun terdapat upaya dari pemerintah daerah, termasuk penyusunan regulasi dan peraturan untuk mendukung literasi, realisasi di lapangan masih membutuhkan dorongan lebih lanjut. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, literasi digital di Indonesia pada umumnya, termasuk di Maros, masih berada pada level "sedang". Indeks literasi digital nasional, yang meliputi aspek informasi dan literasi data, komunikasi dan kolaborasi, keamanan, serta kemampuan teknologi, menunjukkan bahwa masih ada banyak ruang untuk perbaikan, khususnya dalam hal informasi dan literasi data. Perlu ditetapkan strategi tata kelola yang baik dan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) untuk mengupayakan keberlanjutan kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan, melalui identifikasi mekanisme, proses, dan hasil (Dhaoui, 2019).

Pelayanan publik terhadap implementasi *e-government* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros membuat masyarakat lebih mudah mengakses informasi dan mempermudah pelayanan administrasi dan mengurangi biaya administrasi karena proses dapat dilakukan secara elektronik dan otomatis. *E-government* ini membuat masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan layanan prosesnya lebih transparan dan terstandarisasi. Meskipun tatap muka berkurang, tetapi perilaku petugas tetap penting karena pelatihan dan peningkatan keterampilan petugas menjadi kunci penting dalam kepuasan Masyarakat. Respons yang cepat dan sopan tetap menjadi indikator penting. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur TIK, seperti jaringan internet yang stabil dan perangkat keras yang memadai, sangat mempengaruhi efektivitas layanan *e-government*.

*E-government* memainkan peran yang sangat penting dalam transformasi pemerintahan menuju era digital. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, *e-government* dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. Implementasi *e-government* yang efektif juga dapat mendorong partisipasi masyarakat, penghematan biaya, dan pemberdayaan ekonomi digital, serta memastikan keamanan dan keandalan data. Semua ini berkontribusi pada pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun keunggulan dan kelemahan *e-government*. Adapun keunggulan *e-government* yaitu peningkatan Aksesibilitas Layanan, efisiensi administrasi, transparansi dan akuntabilitas, penghemat biaya, peningkatan partisipasi masyarakat, dan kelemahan *e-government* yaitu Keterbatasan Infrastruktur TIK, keamanan dan privasi data, literasi digital, resistensi terhadap perubahan, biaya pengembangan dan pemeliharaan.

#### 4. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum kualitas informasi *website* Pemerintah Kabupaten Maros sudah cukup baik. Penerapan ini telah meningkatkan efisiensi dalam administrasi pemerintahan, memungkinkan pemrosesan data yang lebih cepat dan akurat. Selain itu, kualitas pelayanan publik juga mengalami peningkatan, di mana masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemerintah dengan lebih mudah dan cepat melalui platform digital. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasinya, seperti infrastruktur teknologi yang belum merata, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam teknologi informasi, serta resistensi dari beberapa pegawai terhadap perubahan sistem. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendorong penerapan *e-government* ini, termasuk dengan menyediakan pelatihan dan sosialisasi kepada pegawai serta meningkatkan infrastruktur teknologi. Kekurangan yang dapat mengurangi nilai kualitas informasi ada pada dimensi kelengkapan informasi, yaitu masih kurangnya informasi yang ada. Pengembangan *e-government* merupakan faktor penting dalam mempercepat pembangunan negara dan berdampak pada pembangunan berkelanjutan melalui dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan.

Rekomendasi yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah meningkatkan upaya perbaikan agar dapat melengkapi semua menu dan link yang terdapat pada *website* dengan informasi yang relevan, sehingga pengguna dapat memperoleh informasi yang lengkap dan akurat. Pemerintah daerah perlu terus mengembangkan dan memperluas infrastruktur teknologi informasi, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau. Ini termasuk

peningkatan jaringan internet dan perangkat keras yang memadai serta memberikan pelatihan yang berkelanjutan kepada pegawai pemerintah agar mereka memiliki keterampilan yang diperlukan dalam penggunaan teknologi informasi, serta melakukan sosialisasi pentingnya e-government untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan. dan melibatkan pihak ketiga seperti perusahaan teknologi atau lembaga pendidikan untuk membantu dalam pengembangan dan implementasi sistem *e-government* dapat memberikan perspektif dan sumber daya tambahan yang bermanfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hafira, A., & Kurniasiwi, A. (2021). Implementasi E-Government dalam upaya peningkatan pelayanan berbasis online di Kabupaten Kulon Progo. Caraka Prabhu: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(1), 52-68.
- [2] Noveriyanto, B., Nisa, L. C., Bahtiar, A. S., Sahri, S., & Irwansyah, I. (2018). E-GOVERNMENT SEBAGAI LAYANAN KOMUNIKASI PEMERINTAH KOTA SURABAYA (Studi Kematangan e-government Sebagai Layanan Komunikasi Government to Government, Government to Citizen, Government to Business). Profetik: Jurnal Komunikasi, 11(1), 37-53.
- [3] Nugraha, J. T. (2018). E-Government dan pelayanan publik (studi tentang elemen sukses pengembangan government di pemerintah kabupaten Sleman). Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media, 2(1), 32-42.
- [4] Rozikin, M., Hesty, W., & Sulikah, S. (2020). Kolaborasi dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi E-Government Pemerintah Daerah. Jurnal Borneo Administrator, 16(1), 61-80.
- [5] Maramura, T. C., Dambuza, P., & Jaka, H. (2017). Realizing E-government access for socioeconomic development in rural areas. International Journal of Applied Business and Economic Research, 15(26), 597–609. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=285041191825&partnerID=40&md5=1a62b5fb13006073aa3c952a38504fa7>
- [6] Hamrun, H., Harakan, A., Prianto, A. L., & Khaerah, N. (2020). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pelayanan Berbasis E-Government Di Kabupaten Muna. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 18(2), 64. <https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7808>
- [7] Saksono, H. (2020). Innovation Hub: Media Kolaborasi Menuju Pemerintahan Daerah Inovatif. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 19(1), 1. <https://doi.org/10.35967/jipn.v19i1.7854>
- [8] Samsor, A. M. (2021). Challenges and Prospects of e-Government implementation in Afghanistan. International Trade, Politics and Development, 5(1), 51–70. <https://doi.org/10.1108/ITPD-01-2020-0001>
- [9] Malodia, S., Dhir, A., Mishra, M., & Bhatti, Z. A. (2021). Future of e-Government: An integrated conceptual framework. Technological Forecasting and Social Change, 173, 121102. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121102>
- [10] Dhaoui, I. (2019). Good Governance for Sustainable Development. MPRA Paper No. 92544.
- [11] Dhaoui, I. (2021). E-Government for Sustainable Development: Evidence from MENA Countries. Journal of the Knowledge Economy. <https://doi.org/10.1007/s13132-021-007910>
- [12] Fikriyah, T. M., & Trisnarningsih, S. (2022, May). Studi Literatur Electronic Budgeting Sebagai Peningkatan Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). In Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper (Vol. 2, No. 1, pp. 17-27).
- [13] Masyhur, F. (2014). Kesiapan e-skills pemerintah daerah dalam implementasi e-government di kawasan Mamminasata. Jurnal Pekommas, 17(3), 151-160.
- [14] Munsir, H., Auliah, A. R., Ramadhani, A. N., Amelia, G. R., Amalia, R., Trinanda, S. R., & Qathifah, T. N. (2022). Sosialisasi E-Government Kepada Perangkat Desa Labuaja Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. Jurnal Pengabdian Masyarakat Hasanuddin, 95-103.
- [15] Kurniati, A., Nugroho, L. E., & Rizal, M. N. (2020). Manajemen risiko teknologi informasi pada e-government: ulasan literatur sistematis (Information Technology Risk Management on e-Government: Systematic Literature Review). JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi, 22(2), 207-222.
- [16] Sudirman, F. A., & Saidin, S. (2022). Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) dan Pembangunan Berkelanjutan: Reviu Literatur Sistematis: Reviu Literatur Sistematis. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 21(1), 44-58.
- [17] Juliarso, A. (2019). Analisis implementasi e-government dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik pada pemerintah daerah kabupaten ciamis. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 10(1), 10-15.
- [18] Auliyaa, P., Hidayat, R., & Nababan, R. (2021). Implementasi pelayanan publik berbasis e-government melalui organ lopian. KINERJA, 18(4), 502-512.